

# KETAHANAN SOSIAL DI PERBATASAN: STUDI KASUS PULAU SEBATIK

**Muhammad Fakhry Ghafur**  
*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*  
*E-mail: fakhryghafur@gmail.com*

Diterima: 8-12-2016

Direvisi: 12-12-2016

Disetujui: 27-12-2106

## **ABSTRACT**

*The border is a strategic area that has an important role to build and to defend a country's sovereignty. Through this concept, the role of a border is very important, especially if it was associated with the improvement of a quality of society's life in terms economic, social, political, cultural, environment, defense, and security. A border is an interaction area between globalization and locality which happens in daily life. The progress of a community life in border areas is expected to improve the social resilience in responding the most significant global pressure. Therefore, in order to build a border area, social resilience is needed as it is a very important aspect, especially in Sebatik Island. This paper reviews the potential of social resilience in border area, especially in Sebatik Island that is directly adjacent with Malaysia in both land and sea, by using the qualitative analysis approach and how to manage any potential in the border area to support economic, social, and political development for other areas.*

**Keywords:** *social resilience, border areas, Sebatik*

## **ABSTRAK**

Daerah perbatasan merupakan suatu kawasan yang sangat strategis dan berperan penting dalam membangun serta mempertahankan kedaulatan wilayah negara karena merupakan garda terdepan suatu negara bangsa modern. Melalui arsitektur batas wilayah ini, peran perbatasan sangat strategis, terutama jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan merupakan arena interaksi antara globalisasi dan lokalitas yang terjadi setiap hari. Kemajuan kehidupan masyarakat perbatasan diharapkan akan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam merespons tekanan global yang paling nyata. Oleh karena itu, membangun daerah perbatasan secara optimal sangat penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini mengkaji potensi ketahanan masyarakat di perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung, baik darat maupun laut, dengan Malaysia dan metode pengelolaan setiap persoalan yang ada di perbatasan sehingga dapat menjadi pendorong perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bagi daerah lainnya.

**Kata kunci:** ketahanan sosial, perbatasan, Sebatik

## **PENGANTAR**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Gugusan kepulauan yang ada di Indonesia disatukan oleh lautan yang terhampar luas dan beberapa di antaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, baik darat maupun laut. Tercatat sebanyak 92 pulau merupakan pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Australia (Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005) dan beberapa di antaranya mempunyai beragam

persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia seharusnya mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar, terlebih wilayah yang sarat akan potensi sumber daya alam yang jika dimanfaatkan dengan optimal dapat memperkuat ketahanan masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan sosial dan disintegrasi bangsa. Formulasi khusus diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan

wilayah perbatasan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di perbatasan.

Persoalan pengembangan wilayah perbatasan tidak terlepas dari masih lemahnya paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan pola sentralisasi, dalam arti pemerintah menggunakan paradigma *top down*, yakni melihat perbatasan dalam perspektif Jakarta, tetapi tidak pernah melihat perbatasan dalam perspektif masyarakat perbatasan (Tirtosudarmo & Haba, 2005). Sebagai contoh, hubungan pemerintah pusat dan daerah masih belum terkoordinasi dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang sistematis dan terstruktur. Selain itu, sumber daya manusia yang masih minim dan penegakan hukum yang belum optimal mengakibatkan semakin maraknya pelanggaran hukum transnasional, seperti penangkapan ikan ilegal, pembalakan atau penebangan liar, perdagangan manusia, imigran ilegal, peredaran narkoba, terorisme, perdagangan senjata, dan sebagainya. Hal ini dapat menghambat pengelolaan pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil perbatasan, termasuk di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Pada awalnya, Pulau Sebatik adalah bagian dari Kabupaten Nunukan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa wilayah Sebatik berubah menjadi kecamatan dan sejak 2006, sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 yang menyatakan pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi dua wilayah, yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Seiring dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, pada tahun 2011, wilayah Sebatik dimekarkan kembali menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah. Letak strategis yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Pulau Sebatik sebagai wilayah strategis lintas negara. Namun, dibalik beragam potensi yang dimilikinya, Pulau Sebatik memiliki berbagai persoalan, terutama

dalam pengelolaan pembangunan dan peningkatan ketahanan sosial di wilayah tersebut.

Ketahanan sosial di Pulau Sebatik dapat terwujud melalui sebuah kekuatan yang saling bersinergi satu dengan yang lain, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi maupun sumber daya alam (Sakdapolrak, 2016). Ketahanan sosial dalam sebuah komunitas juga sangat tergantung dari sejumlah aset atau potensi, seperti modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal fisik, dan modal manusia. Oleh karena itu, Murray dan Zautra (2012) mendefinisikan ketahanan sosial secara lebih spesifik, yaitu sebagai sebuah respons adaptif suatu masyarakat terhadap berbagai macam ancaman yang diaktualisasikan melalui beberapa proses, yaitu pertama melalui pemulihan, kemudian kontinuitas (keberlanjutan), dan terakhir adalah ditandai dengan adanya pertumbuhan. Sementara itu, menurut Carlson (2012) ketahanan sosial sangat terkait erat dengan kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi berbagai macam gangguan sehingga terbebas dari kesulitan yang dihadapi.

Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa ketahanan sosial tidak hanya kemampuan untuk mempertahankan diri semata, tetapi ada suatu proses yang dapat membawa masyarakat kepada sebuah kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketahanan sosial mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengatasi berbagai macam gangguan dan kesulitan yang menghadang.

Peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan program terhadap ketahanan sosial sangat penting karena ketahanan sosial merupakan salah satu pilar dari keberhasilan pembangunan negara. Kualitas ketahanan sosial masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui hubungan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, dan penguatan modal atau potensi lainnya. Untuk mengukur ketahanan sosial di suatu wilayah dapat menggunakan metode yang dikemukakan Sakdapolrak, yaitu pengukuran ketahanan sosial berupa potensi yang dimiliki, meliputi modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi (sumber keuangan), modal fisik dan modal manusia.

Sebenarnya tema mengenai dinamika sosial-politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Pulau Sebatik sudah banyak dikaji, baik oleh instansi maupun para peneliti sosial, namun kajian khusus mengenai ketahanan sosial masyarakat Sebatik masih jarang dilakukan di Indonesia. Misalnya, kajian terdahulu hanya menekankan aspek kajian sosial dan ekonomi, seperti hasil penelitian Siberian (2012) dengan judul Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya* volume 14 nomor 1 tahun 2012, yang lebih menekankan aspek sosioekonomi wilayah perbatasan Sebatik dan analisis dari Saleh (2015) tentang Dinamika Masyarakat Perbatasan dalam *Jurnal Borneo Administrator* volume 11 nomor 1 tahun 2015 yang lebih menekankan aspek sosiokultural masyarakat perantau di Pulau Sebatik.

Tulisan ini akan mencoba untuk menggambarkan potensi yang dimiliki Pulau Sebatik, baik berupa potensi alam, sosial-politik, ekonomi maupun sarana dan prasarana, di samping menguraikan sejumlah permasalahan seputar pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan serta berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Gambaran potensi yang ada serta strategi pengelolaannya diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam peningkatan ketahanan sosial di wilayah Sebatik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneli-

tian sebelumnya terletak pada aspek ketahanan sosial yang belum banyak dikaji secara lebih spesifik.

## GAMBARAN UMUM PULAU SEBATIK

Dilihat dari kondisi geografis, baik iklim maupun potensi alamnya, wilayah Sebatik Indonesia tidak jauh berbeda dengan wilayah Sabah (Sebatik Malaysia). Kedua wilayah tersebut berada dalam satu pulau yang beriklim tropis dan berhutan lebat serta mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas hujan yang tinggi hingga mencapai 1.500 mm per tahun. Kondisi ini menjadikan pulau Sebatik sebagai wilayah yang sangat subur dan potensial untuk area pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa, pisang, maupun kakao. (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b).

Selain kaya akan sumber daya alam hasil pertanian dan perkebunan, Pulau Sebatik juga kaya akan potensi sumber daya mineral, baik dari minyak bumi maupun gas, meski pada kenyataannya sumber daya mineral belum banyak dieksplorasi pemerintah di wilayah perbatasan Sebatik. Potensi sumber daya alam mineral berupa gas di sana diperkirakan cukup besar yang secara kasat mata dapat dilihat dengan



Sumber: Mengintip Perbatasan Negeri (2015)

**Gambar 1.** Peta Sebatik

mulai bermunculannya industri gas alam yang dikelola oleh pemerintah Malaysia, khususnya di daerah perbatasan dekat Bambangan. Selain itu, sumber daya mineral berupa minyak bumi di Sebatik masih cukup potensial di mana pada tahun 2002 sudah mencapai 2,1 juta barel dan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan (Bakar, 2006).

Sementara itu, secara demografis, Sebatik Indonesia adalah wilayah yang lebih banyak penduduknya, sedangkan untuk wilayah Sabah (Malaysia) lebih banyak digunakan untuk perkebunan dan tempat pengolahan sawit. Penduduk yang menghuni Pulau Sebatik sebagian besar adalah pendatang yang berasal dari Bugis, Jawa, dan Flores (Nusa Tenggara Timur), sedangkan masyarakat asli Sebatik adalah Suku Tidung yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan tahun 2014, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Sebatik secara keseluruhan mencapai 40.645 jiwa (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b). Sebagian besar masyarakat Sebatik berprofesi sebagai petani, baik di sektor tanaman perkebunan maupun pangan, sedangkan selebihnya bekerja sebagai pedagang dan nelayan. Selain itu, peran masyarakat dalam sektor perdagangan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebagai sumber mata pencaharian pendukung bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, hubungan sosial kekerabatan antara warga Sebatik dan Tawau sudah terjalin sejak lama karena memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Banyak warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di Tawau dan menjadi warga negara Malaysia, bahkan sebagian warga Sebatik ada yang mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan *Identity Card* (IC) Malaysia. Setiap tahunnya, interaksi sosial berupa kunjungan ataupun aktivitas perdagangan warga antarkedua negara cenderung meningkat. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya modal sosial yang signifikan di wilayah perbatasan Sebatik.

Meski wilayah Sebatik memiliki potensi alam berlimpah dan hubungan sosial yang kuat, namun bukan berarti kondisi ketahanan sosial

masyarakatnya tergolong kuat, bahkan kondisi Sebatik masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya, seperti Tawau yang sudah melangkah maju dalam ekonomi dan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam kondisi ketahanan sosial masyarakat Sebatik, pembahasan mengenai beberapa aset atau potensi yang dimiliki serta sejumlah faktor penghambat wilayah perbatasan Sebatik sangat diperlukan. Selanjutnya, penulis akan membahas beberapa aset atau potensi utama yang terdapat di wilayah perbatasan Sebatik.

### **SUMBER DAYA ALAM SEBATIK: POTENSI YANG TERPENDAM**

Pulau Sebatik merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan informasi yang dihimpun selama melakukan penelitian di Sebatik, pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi warga Sebatik. Sebagai contoh, perkebunan sawit, kakao (cokelat), kelapa maupun pisang terhampar luas hampir di seluruh sudut Pulau Sebatik dan memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perekonomian warga.

Berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, bahwa sebagian besar sektor pertanian adalah penggerak utama ekonomi masyarakat. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebesar 25,8 ribu meter persegi dijadikan sebagai lahan yang digunakan dalam usaha pertanian, terutama dari sektor padi dan palawija (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b), sedangkan luas lahan bukan sawah yang digunakan untuk kelapa sawit juga mengalami peningkatan menjadi 23,7 ribu meter persegi. Peningkatan ini dikarenakan semakin banyaknya lahan masyarakat yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam warga di mana kurang lebih 3,5 juta pohon sawit memenuhi 1,778 ha kebun sawit di Pulau Sebatik. Hasil sawit dari Sebatik sebagian besar dijual ke Tawau dalam

bentuk tandan buah segar (TBS) karena sampai saat ini belum ada pabrik pengolahan kelapa sawit yang besar dan bekerja optimal di Sebatik.

Selain kelapa sawit, kakao merupakan areal perkebunan terbesar kedua yang banyak diusahakan atau ditanam warga dan banyak tersebar di Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik Barat. Sementara itu, kopi adalah populasi ketiga terbesar yang paling banyak diusahakan di kecamatan Sebatik Timur dan Barat. Pada awal tahun 2002, kopi pernah menjadi primadona sektor perkebunan warga Sebatik dengan kualitas dan harganya yang dapat bersaing dengan negara tetangga Malaysia, namun karena kurangnya perhatian dalam pengelolaan hasil panen kopi, permintaan pun menurun yang mengakibatkan harga kopi turun drastis sehingga masyarakat beralih pada tanaman lainnya yang lebih menguntungkan. Di samping kelapa sawit, kakao, dan kopi, komoditas pisang merupakan hasil bumi yang juga banyak diusahakan di wilayah Sebatik dan sebagian besar hasil panen dijual dalam bentuk pisang mentah ke Tawau, Malaysia, sedangkan sebagian lagi diolah dan dikonsumsi sendiri oleh petani. Mayoritas pedagang di Tawau tidak menerima hasil olahan pisang petani Sebatik dengan alasan tidak bersebel dan yang tidak memenuhi standar.

Sebagian besar lahan di pulau Sebatik dikuasai oleh warga sebagai pengusaha perkebunan dengan penghasilan yang besar dibanding dengan pengepul, pekerja maupun penyedia transportasi. Di antara mereka, ada yang membentuk kelompok usaha tani untuk mengelola dan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Keuntungan yang diperoleh (pengusaha atau kelompok usaha tani) berguna dalam mendorong kemajuan dalam bisnis lainnya, seperti industri pengolahan keripik pisang dan untuk budi daya peternakan serta perikanan.

Sementara itu, lahan perkebunan ataupun pertanian yang luas di wilayah Sebatik Indonesia telah mendorong lahirnya sekitar 4.436 rumah tangga usaha pertanian baru dan mampu menyerap sekitar 78% tenaga kerja usia produktif di sektor pertanian, sedangkan sekitar 95% terserap di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b). Jika dibandingkan dengan usaha perkebunan lainnya, seperti pisang, kakao, dan kopi, sektor perkebunan kelapa

sawit masih terbilang baru. Namun, pada era pascareformasi dan seiring banyaknya petani yang membuka lahan untuk perkebunan kepala sawit, subsektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan dapat menjadi sumber devisa terbesar di Sebatik setelah Kakao dan pisang. Dapat dibayangkan dengan semakin bertambah luasnya usaha perkebunan kelapa sawit maka jumlah lahan yang akan digunakan di pulau Sebatik untuk sektor kelapa sawit akan semakin luas di masa mendatang.

Meski demikian, lahan kelapa sawit yang luas belum disertai dengan tata kelola lahan yang baik sehingga berpotensi merusak lingkungan karena dapat merusak ekosistem dan ketersediaan air, terutama untuk usaha sektor perkebunan lainnya. Selain itu, dalam hal distribusi, hasil panen kelapa sawit lebih banyak dipasarkan ke Tawau daripada ke wilayah lainnya. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya para pedagang atau pengumpul yang memasarkan hasil bumi ke Tawau yang memang berdekatan dengan patok tiga perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sekitar puluhan ton hasil perkebunan milik petani di wilayah Sebatik Indonesia setiap harinya dipasarkan oleh pengumpul ke Malaysia dengan menggunakan kapal kayu ukuran besar yang mampu memuat sekitar lima ton hasil perkebunan.

Kondisi itu dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat Sebatik. Pada satu sisi, aktivitas perdagangan lintas batas di sektor pertanian dan perkebunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Namun di sisi lain, maraknya aktivitas ilegal dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal serta ketersediaan infrastruktur yang masih kurang menjadikan nilai ekonomis pada sektor ini menjadi belum teroptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyediakan infrastruktur yang baik, terutama untuk pengelolaan dan distribusi agar hasil panen perkebunan di wilayah Sebatik dapat optimal.

Selain sektor perkebunan dan pertanian, potensi sumber daya laut di wilayah perairan Sebatik merupakan aset yang besar dan perlu dikembangkan lebih optimal. Potensi di sektor perikanan Sebatik meliputi potensi ikan tangkap dan budi

daya udang serta ikan pelagis yang tersebar di sekitar perairan Sebatik. Karena potensi lautnya yang melimpah, perairan Sebatik dikategorikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IV Selat Makasar dan Laut Arafuru serta WPP VII laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Perairan Sebatik yang masuk dalam WPP VII diperkirakan mempunyai potensi yang sangat besar untuk udang dan ikan pelagis (Sebatik, 2016). Jika melihat dari dua kategori wilayah di atas, peluang untuk pengembangan pemanfaatan perikanan di wilayah Sebatik yang tersebar di sekitar Pulau Bukat masih sangat terbuka, terutama untuk ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang, dan lobster.

Potensi besar dari sumber daya perikanan di Sebatik ditandai dengan semakin menggeliatnya usaha di sektor perikanan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan budi daya ikan, baik ikan laut maupun rumput laut yang sarat manfaat dan berdaya jual tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil survei tahun 2013 menunjukkan bahwa di wilayah Sebatik terdapat 1.116 rumah tangga yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan dan sebanyak 1.094 rumah tangga melakukan penangkapan ikan di laut lepas. (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b).

Meski kekayaan bahari di perairan Sebatik cukup melimpah dan aktivitas budi daya dan penangkapan ikan menggeliat, namun nilai jual ikan hasil tangkap ataupun budi daya di Sebatik masih sangat dipengaruhi oleh sistem perdagangan lintas batas yang sebagian besar dipengaruhi oleh dermaga Tawau, Malaysia. Dengan kata lain, hasil tangkapan ikan nelayan Sebatik diberi harga yang sangat murah di pasaran Tawau dengan alasan ukuran dan kualitas ikan hasil tangkap tidak memenuhi standar, khususnya dalam hal pengemasan pengolahan ikan. Padahal jika dikelola dengan baik, nilai jual hasil tangkapan nelayan bisa berdaya jual tinggi karena kualitas ikan di perairan Sebatik yang berkualitas.

Selain itu, minimnya infrastruktur penangkapan dan pengelolaan ikan juga menjadi persoalan dalam meningkatkan potensi sumber daya perikanan di wilayah Sebatik. Banyak nelayan yang menjual hasil tangkapan ikan mereka ke Tawau, Malaysia, karena harga yang tinggi dan supaya

tidak ada hasil tangkapan yang tersisa dan membusuk. Hal itu disebabkan belum tersedianya *cold storage* atau tempat pembekuan ikan di wilayah Sebatik Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan untuk menjual ikan hasil tangkap sehingga ikan tidak cepat membusuk dan layak jual.

Di sisi lain, belum adanya pelabuhan berstandar nasional dan penutupan Pas Lintas Batas (PLB) sebagai garda depan aktivitas lintas batas menjadi kendala bagi para nelayan. Aktivitas perdagangan dan penangkapan ikan masih dilakukan secara tradisional melalui jalur ilegal serta dengan menggunakan kapal kayu yang jauh dari standar internasional. Sementara itu, jarak pelabuhan berstandar nasional di Kabupaten Nunukan yang cukup jauh yang membutuhkan biaya cukup besar jika harus melalui nunukan. Kondisi ini menjadikan para nelayan kesulitan untuk menjual hasil tangkap ikan.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana penunjang menyebabkan para nelayan kalah bersaing dengan para pedagang dan nelayan dari Tawau, Malaysia. Akibatnya, banyak nelayan Sebatik lebih memilih memasarkan ikannya di Tawau daripada ke Nunukan. Jauh daripada itu, banyak dari kapal-kapal besar asing yang pada akhirnya memilih untuk bersandar dan bertransaksi di dermaga Tawau. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pengelolaan kekayaan hasil laut yang sangat potensial di perairan Sebatik. Bahkan, banyak warga berharap adanya bantuan berupa kapal penangkap ikan yang memenuhi standar sehingga dapat bersaing dengan nelayan dari Malaysia. Selain itu, PLB yang sebelumnya sempat ditutup pada tahun 2011 dapat dibuka kembali untuk menggenjot aktivitas perekonomian wilayah Sebatik dan menekan aktivitas perdagangan lintas batas ilegal.

Sementara itu, sektor sumber daya alam nonhayati berupa minyak bumi dan gas alam di wilayah Sebatik Indonesia masih belum dieksplorasi secara optimal. Potensi kedua sektor tersebut diperkirakan cukup besar, namun hingga kini belum ada perusahaan yang melakukan riset dan eksplorasi lebih jauh terkait dengan cadangan mineral di Sebatik. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang sudah memulai eksplorasi gas alam di

sekitar wilayah perbatasan Sabah dekat wilayah Bambangan. Kandungan pasir di wilayah Sebatik Indonesia juga sangat potensial yang diperkirakan mencapai lima ratus juta ton serta potensi lainnya yang begitu besar. Riset dan peran pemerintah sangat diperlukan untuk menggali sumber daya mineral di wilayah Sebatik yang belum terungkap.

## **KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SEBATIK**

Secara umum, kondisi sosial masyarakat di wilayah Sebatik Indonesia tidak jauh berbeda dengan masyarakat di wilayah Sebatik, Sabah, Malaysia, baik dalam agama, profesi mayoritas warganya maupun dalam hal interaksi sosial dan budaya. Kesamaan tersebut ditunjukkan dengan kuatnya interaksi sosial dan budaya di kedua wilayah yang sudah terjalin sejak lama. Selain itu, interaksi dengan masyarakat dan suku sesama pulau Sebatik berjalan cukup harmonis dan dinamis, bahkan konflik sosial hampir tidak pernah terjadi (Setiawan, 2012). Hal itu tidak lepas dari kesadaran warga untuk saling menghargai antarsuku. Interaksi sosial yang kuat semacam ini dapat menjadi modal atau aset yang penting dalam menunjang pembangunan di Pulau Sebatik, tidak hanya bagi warga Sebatik Indonesia, tetapi juga warga Sabah, Malaysia.

Jumlah penduduk di wilayah Sebatik Indonesia tidaklah banyak jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nunukan tahun 2015, bahwa penduduk Sebatik berjumlah 40.645 jiwa yang tersebar di lima kecamatan dengan mayoritas penduduk adalah perantau yang berasal dari Bugis, Jawa, dan Flores. Sementara itu, suku asli Sebatik adalah suku Tidung yang sebagian besarnya menganut ajaran Islam. Mayoritas perantau di Pulau Sebatik berasal dari Bugis sehingga kebiasaan adat istiadat maupun budaya masyarakatnya tidak lepas dari budaya bugis yang mewarnai beragam dimensi kehidupan masyarakat, bahkan budaya bugis sangat berpengaruh dalam setiap interaksi sosial dengan warga di wilayah Tawau.

Sebelum disinggahi oleh para perantau, wilayah Sebatik Indonesia adalah wilayah yang dikelilingi oleh hutan primer yang masih jarang penduduknya. Tanahnya yang subur disertai

dengan lahan hutan yang luas dan berbukit serta sangat jarang penduduknya menjadikan Sebatik sebagai daerah transit yang potensial bagi para imigran (Setiawan, 2012). Banyak di antara para perantau yang membeli tanah dan membuka lahan baru untuk bermukim maupun mengembangkan usaha, baik dalam ekonomi perdagangan, pertanian, dan perikanan. Modal sosial yang kuat dengan sistem kekerabatan yang sudah terjalin sejak lama dengan penduduk Malaysia mendorong warga perantau di Sebatik untuk melakukan aktivitas lintas batas.

Selain itu, jarak yang berdekatan dengan Tawau yang dapat ditempuh dalam waktu 15–sampai dengan 20 menit perjalanan dari Sei Pancang telah mendorong interaksi masyarakat kedua negara semakin kuat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Secara ekonomi, adanya interaksi sosial yang kuat mendorong semakin menggeliatnya perekonomian warga kedua wilayah. Banyak para petani dan pengumpul hasil bumi berupa kelapa sawit, kakao, kopi, dan pisang atau hasil tangkap ikan warga Sebatik yang dijual ke Tawau dengan menggunakan kapal kayu besar melintasi sungai Pancang dengan memanfaatkan jaringan para pedagang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan para pedagang di Tawau, Malaysia. Hal ini sulit dilakukan bagi seorang petani atau pedagang untuk bisa menjual hasil pertanian yang tidak mempunyai ikatan kekerabatan dengan warga Tawau. Begitu juga sebaliknya, setelah memasarkan hasil pertanian ataupun tangkapan ikan, para pedagang membeli beragam kebutuhan pokok dari Malaysia, seperti beras, terigu, minyak goreng, gula pasir hingga bensin dan gas elpiji yang sebagian besar merupakan barang komoditas yang disubsidi oleh pemerintah Malaysia (Sibirian, 2012).

Aktivitas lintas batas yang dilakukan sejak lama itu tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan dan hubungan emosional yang kuat antarwarga di kedua negara. Hubungan ini memang sudah menjadi budaya yang secara turun temurun dijaga warga dari kedua negara dan terus berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan penuturan salah satu warga di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, banyak keluarga maupun para tokoh masyarakat yang saling berkunjung untuk menghadiri peringatan kenegaraan atau

festival budaya maupun kunjungan kekerabatan. Para pelintas batas yang hendak berkunjung atau berniaga ke Tawau, selain sudah mempunyai Kartu Lintas Batas (KLB), juga sudah mempunyai jaringan atau koneksi di Tawau. Jaringan inilah yang membantu para warga dari Sebatik untuk dapat berhubungan atau membeli sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Malaysia (Suparman, 2016).

Selain melalui jaringan atau koneksi, untuk masuk wilayah Malaysia warga Sebatik Indonesia harus menggunakan paspor atau Kartu Pas Lintas Batas. Berdasarkan penuturan warga, sejak tahun 2011, kantor Pas Lintas Batas di Sei Nyamuk ditutup sehingga bagi warga yang akan ke Tawau harus mengurusnya di kantor imigrasi tingkat kabupaten. Adapun alasan ditutupnya PLB di Sei Nyamuk karena mode transportasi yang digunakan pelintas batas tidak memenuhi standar internasional dan upaya modernisasi aktivitas lintas batas dalam satu pintu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penutupan PLB di Sei Nyamuk Sebatik berdampak pada semakin maraknya aktivitas ilegal yang merugikan Indonesia. Jaraknya yang jauh, kurang efisien, dan biaya yang mahal menjadikan warga Sebatik enggan untuk mengurus kartu Pas Lintas Batas dan sebagian dari mereka lebih memilih untuk menyeberang secara ilegal melalui jalur tikus yang banyak dilalui para pelintas batas, terutama di Desa Aji Kuning yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah atau melalui perantara jaringan kerabat di Tawau yang memiliki *Identity Card* Malaysia yang dapat digunakan untuk aktivitas lintas batas. Bahkan, sebagian warga ada yang memilih untuk memiliki kewarganegaraan ganda agar dapat melakukan aktivitas lintas batas guna memenuhi kebutuhan hidup yang memang ketersediaannya masih terbatas.

Selain karena dampak dari penutupan PLB, aktivitas lintas batas yang intensif dari masyarakat Sebatik disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi kepada Malaysia. Ketergantungan itu telah terjadi sejak lama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sebatik Indonesia. Pembangunan yang belum optimal dan masih terbatasnya ketersediaan kebutuhan pokok produksi Indonesia ke Pulau

Sebatik menjadi penyebab semakin kuatnya ketergantungan masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, peningkatan biaya hidup, dan banyaknya impor barang Malaysia yang masuk ke Indonesia memaksa masyarakat untuk menggantungkan hidupnya pada negara tetangga karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar kebutuhan pokok dipasok dari Malaysia (Saleh, 2015).

Meskipun di satu sisi ketergantungan kepada Malaysia menguntungkan dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, ketergantungan ini jelas merugikan Indonesia dan menjadi ancaman bagi ketahanan sosial masyarakat karena, secara ekonomi, masyarakat Sebatik menjadi bagian dari Malaysia yang lambat laun akan menggerus rasa nasionalisme maupun mengurangi potensi ekonomi di perbatasan. Oleh karena itu, selain meningkatkan infrastruktur, pemerintah perlu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terbatas dan dianggap penting, seperti beras, gula, minyak goreng, bensin maupun gas sehingga ke depan masyarakat tidak lagi banyak tergantung pada barang-barang dari Malaysia (Saleh, 2015).

## MODAL PEMERINTAHAN SEBATIK

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Sebatik Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga dalam geopolitik sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan Nawacita pemerintahan Jokowi, Pulau Sebatik dijadikan sebagai salah satu wilayah di perbatasan yang mendapatkan prioritas dan perhatian intensif dalam pembangunan. Peran pemerintah maupun institusi daerah sangat vital, terutama dalam mengelola pembangunan dan mengembangkan berbagai potensi di wilayah Sebatik.

Wilayah Sebatik pada awalnya merupakan salah satu dari lima kecamatan dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada tahun 2006, Kecamatan Sebatik dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Terakhir, pada tahun 2011, wilayah Sebatik dimekarkan lagi menjadi lima kecamatan yang meliputi

Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah. (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b).

Total luas wilayah Sebatik sekitar 246,61 km persegi dengan luas wilayah hutan yang dapat dikonservasi 375,52 ha. Sementara itu, jumlah penduduk di wilayah Sebatik mencapai 40.645 jiwa yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik 5.419 jiwa, Kecamatan Sebatik Barat 8.193 jiwa, Kecamatan Sebatik Tengah 7.430 jiwa, Kecamatan Sebatik Timur 12.966 jiwa, dan Kecamatan Sebatik Utara 6.637 jiwa (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b). Berdasarkan jumlah tersebut, sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari Bugis, Jawa, dan Flores (Nusa Tenggara Timur) dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, kecuali beberapa di wilayah Sebatik Tengah yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan mengelola perkebunan sawit, kakao, dan pisang (BPS Kabupaten Nunukan, 2015d).

Pada kenyataannya, luas wilayah dan jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah institusi maupun pegawai yang ada di setiap kecamatan wilayah Sebatik. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nunukan (2015), jumlah aparatur desa/kelurahan/kecamatan di wilayah Sebatik masih belum memadai jika dibanding dengan kecamatan lainnya. Di lima kecamatan, rata-rata jumlah pegawai masih sedikit dan belum memadai untuk melayani masyarakat dengan optimal. Idealnya, jumlah aparatur sipil sebanding dengan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, terutama terkait dengan aktivitas lintas batas yang kerap menimbulkan persoalan. Sebagai contoh, jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Sebatik Tengah, baik PNS maupun non-PNS, mencapai 64 orang dengan jumlah instansi yang masih terbatas. Padahal, di antara lima kecamatan, Sebatik Tengah adalah kecamatan yang paling banyak bersinggungan dengan Malaysia dengan perbatasan darat terpanjang mencapai 47,71 km persegi dan dilalui oleh sembilan patok dari delapan belas patok perbatasan Indonesia dan Malaysia, mulai dari patok tiga di Desa Aji Kuning sampai patok sebelas di Desa Sungai Limo. (BPS Kabupaten Nunukan,

2015b). Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah khususnya dalam meningkatkan peran instansi dan aparatur daerah sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat optimal.

Sama halnya dengan Kecamatan Sebatik Tengah, jumlah aparatur negara di Sebatik Utara masih belum memadai. Total pegawai di tingkat desa atau kecamatan berjumlah sekitar 28 orang dengan latar pendidikan SMA sekitar 23 orang, sementara pegawai yang berpendidikan sarjana hanya berjumlah dua orang (BPS, 2015d). Idealnya, untuk mewujudkan pelayanan optimal, khususnya di wilayah yang sarat potensi perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Kondisi minimnya pegawai dan SDM di sejumlah kecamatan di Sebatik jelas dapat berdampak pada tidak optimalnya pelayanan yang diberikan sehingga banyak persoalan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Faktor minimnya SDM di tingkat kecamatan tidak lepas dari belum meratanya pendistribusian pegawai dan belum mengacu pada analisis jabatan dan beban kerja yang ada di wilayah Sebatik.

Di wilayah Sebatik terdapat beberapa unit kerja yang menangani sejumlah bidang, seperti dalam Pamtas, pos Marinir maupun pos TNI AL yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan sepanjang wilayah perbatasan serta pos imigrasi yang belakangan ditutup dan dialihkan ke Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan dalam rangka optimalisasi pelayanan satu pintu, kemudian terdapat UPTD SKB dan Pendidikan, UPT Dishub, UPT Kebersihan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta Puskesmas.

Di samping perlunya menambah jumlah tenaga pegawai di setiap instansi dan unit kerja daerah, pemerintah juga perlu untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Sebatik. Hal yang perlu menjadi perhatian lebih adalah peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah Sebatik, terutama dalam hal penjagaan keamanan di tapal batas untuk menghindari semakin maraknya aktivitas pelanggaran hukum transnasional. Saat ini, penjagaan keamanan di wilayah perbatasan masih terkendala sejumlah persoalan, antara lain masih terbatasnya jumlah

personil TNI, baik yang ada di Pamtas maupun pos AL serta sarana dan prasarana pendukung operasi di lapangan, khususnya dalam rangka aktivitas menjaga keamanan dari ancaman pelanggaran hukum di sekitar wilayah perbatasan. Di samping itu, banyaknya “jalur tikus” memungkinkan semakin maraknya aktivitas lintas batas ilegal di wilayah Sebatik.

## POTENSI EKONOMI SEBATIK

Sebagian besar sumber penghasilan masyarakat di Sebatik berasal dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan wiraswasta (berdagang). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, sektor perkebunan menghasilkan sejumlah komoditi utama yang dapat di ekspor ke negara tetangga, seperti kakao, kelapa sawit, kelapa, dan pisang. Pada awalnya kakao adalah area perkebunan yang paling luas dibandingkan dengan area perkebunan lainnya di Sebatik. Namun, belakangan ini lahan kakao sedikit demi sedikit mulai beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Harga kakao yang jatuh di pasaran membuat petani lebih memilih untuk menanam kelapa sawit yang harganya tinggi di dermaga Tawau, Malaysia. Saat ini, sektor perkebunan yang sangat potensial adalah kelapa sawit yang tumbuh sangat pesat di Sebatik dan menjadi penghasilan utama masyarakat. Luas area perkebunan Sawit di Sebatik mencapai 1.778 ha dengan hasil produksi per tahunnya mencapai enam ribu ton (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b). Sebagian besar hasil Sawit di jual ke negara tetangga yang memang sudah mempunyai sejumlah pabrik pengolahan Sawit di sekitar wilayah perbatasan.

Sementara itu, di sektor peternakan, ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat Sebatik adalah sapi potong yang mencapai 529 ekor dan pemotongan sekitar 134 ekor pertahunnya, sedangkan kambing mencapai 170 ekor, kerbau 49 ekor serta ayam lokal yang mencapai jumlah 14.806 ekor (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b). Meskipun sektor ini berkembang cukup pesat, namun masih banyak warga yang membeli daging sapi maupun ayam untuk konsumsi dari negara tetangga. Faktor harga menjadi alasan peternak untuk menjual hasil peternakan ke Tawau.

Selain perkebunan dan peternakan, sektor perikanan adalah komoditas utama masyarakat Pulau Sebatik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga yang mengusahakan budi daya ikan dan penangkapan ikan (BPS Kabupaten Nunukan, 2015b) Rata-rata hasil tangkapan ikan nelayan Sebatik bisa mencapai 203,5 ton per bulan dengan produksi rata-rata dapat mencapai 2.446 ton. Dari sini dapat dilihat bahwa potensi sumber daya perikanan di Sebatik sangat potensial dan cukup besar terutama di sekitar perairan Pulau Bukat, Sebatik dan di sekitar Pulau Nunukan. Meskipun demikian, sampai saat ini para nelayan terkendala dalam pengolahan hasil tangkapan karena belum adanya industri pengolahan hasil perikanan serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukungnya.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat analisis bahwa transaksi ekonomi masyarakat Sebatik lebih banyak ke Malaysia daripada daerah lainnya. Posisi geografis Pulau Sebatik yang berdekatan dengan negara tetangga, Malaysia, menyebabkan transaksi ekonomi lebih banyak ke Malaysia daripada daerah lainnya dengan alasan karena harga dan kualitas barang lebih bagus, di samping jaraknya yang dekat dan transportasi lebih memadai. Dengan waktu tempuh sekitar 15 sampai 20 menit menggunakan *speed boat*, warga Sebatik sudah bisa menampakkkan kaki di Tawau.

Sementara itu, dalam hal transaksi ekonomi, masyarakat Sebatik terbiasa menggunakan ringgit dibanding rupiah yang paling banyak digunakan dan menjadi alat tukar utama dalam bertransaksi di sejumlah pasar tradisional Sebatik. Hal ini tidak lepas dari banyaknya barang-barang buatan Malaysia yang beredar dan digunakan masyarakat. Berdasarkan penuturan warga di Desa Aji Kuning, masyarakat lebih memilih menggunakan produk-produk dari Malaysia karena harganya yang murah dan mudah didapat.

Untuk membeli barang produk Indonesia, masyarakat harus ke Nunukan atau Tarakan yang jaraknya lebih jauh dengan harga yang relatif lebih mahal akibat masih minimnya transportasi dan infrastruktur yang belum memadai. Pada akhirnya, Sebatik wilayah Indonesia menjadi tempat penampungan hasil produksi Malaysia seperti, beras, gula, minyak goreng, telur, susu,

sementara Tawau menjadi tempat pelemparan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan yang merupakan produksi utama masyarakat Sebatik. Hal tersebut merupakan gambaran berapa besar keuntungan yang didapat dari hasil perdagangan lintas batas masyarakat di pulau Sebatik.

Peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas mendorong kedua negara memberlakukan Pas Lintas Batas sebagaimana yang disepakati dalam *Border Cross Agreement* (BCA) yang disepakati pada tahun 1970. Merujuk pada BCA, pemerintah telah menetapkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 yang mengatur jenis dan jumlah barang baik sarana transportasi, pelintas batas, dan barang bawaan. Peraturan ini juga menetapkan kuota lintas batas sebesar 600,00 ringgit pada setiap perahu untuk setiap trip yang dihitung per orang dalam jangka waktu satu bulan. Meskipun besaran ini sudah tidak sesuai, namun banyak kalangan memandang agar tetap dipertahankan, terlebih beban hidup masyarakat yang tinggi dan semakin menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat.

Terlepas dari sisi positif maupun negatif, adanya aktivitas lintas batas dapat menguntungkan perekonomian kedua negara, terlebih besarnya potensi ekonomi di Pulau Sebatik. Dalam konteks Sebatik Indonesia, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih berkembang dan dinamis jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pasar tradisional dan lembaga keuangan mulai menggeliat dengan dibukanya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Pegadaian. Untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata, di Sebatik sudah ada sejumlah hotel atau penginapan, antara lain dua unit penginapan di Sebatik Timur dan dua unit hotel dan penginapan di Sebatik Utara. Pulau Sebatik merupakan kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata karena posisi strategis yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia dan berdekatan dengan Malaysia. Objek pariwisata yang bisa dikembangkan, meliputi wisata pantai dan ekowisata berbasis ekosistem mangrove, terlebih jika sudah dibentuk Kawasan Berikat Tematik (KBT) yang dapat dihubungkan dengan Tarakan maupun pulau lain di sekitar Sebatik.

## KONDISI FISIK SAAT INI

Infrastruktur adalah komponen penting untuk menunjang perekonomian suatu wilayah. Sebagai sebuah kawasan yang baru berkembang, infrastruktur di Sebatik masih dapat dikatakan tertinggal jika dibanding dengan wilayah lainnya, terutama dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Pembangunan infrastruktur masih belum maksimal, seperti fasilitas kesehatan, air bersih, sarana transportasi, komunikasi, dan pendidikan.

Untuk fasilitas kesehatan yang ada di Sebatik, saat ini jumlahnya masih belum memadai dengan hanya memiliki satu unit puskesmas induk dan 49 unit posyandu (BPS Kabupaten Nunukan, 2015a). Minimnya fasilitas kesehatan jelas menghambat warga yang akan berobat, terlebih jika ada salah seorang anggota keluarga yang sakit dan hendak menjalani rawat inap sehingga banyak warga Sebatik yang akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit di Nunukan atau Tawau yang mempunyai fasilitas yang lebih baik. Akibatnya, banyak warga Sebatik yang memilih untuk berobat ke rumah sakit daripada harus ke puskesmas. Hal ini jelas menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat Sebatik dalam pemenuhan kesehatan keluarga.

Selain itu, ketersediaan air bersih juga menjadi persoalan di wilayah Sebatik. Kondisi tanah yang berbukit dan tandus akibat semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi kurang karena air tanah tidak dapat mencukupi akibat tanah yang tandus. Oleh sebab itu, masyarakat sudah sejak lama menghendaki dibangunnya sarana penampungan air bersih karena selama ini warga hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Intensitas hujan yang tinggi di Sebatik menjadikan air hujan sebagai sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan air mayoritas warganya. Kualitas air hujan yang kurang baik untuk memasak maupun minum menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga di Desa Aji Kuning, tempat penampungan air bersih tengah dibangun untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di Sebatik Tengah.

Sementara itu, sarana jalan dan transportasi darat di Sebatik masih belum terintegrasi secara

menyeluruh, baik jalan penghubung antarkecamatan maupun antardesa yang sebagian masih belum diaspal (jalan tanah dan bebatuan). Bisa dibayangkan ketika musim penghujan, kondisi jalan belum diaspal akan sulit untuk dilalui kendaraan yang pada akhirnya dapat menghambat aktivitas warga. Adapun jumlah sarana transportasi umum yang ada di Sebatik masih terbatas dan dengan biaya yang mahal, terutama jika hendak ke Nunukan melalui Bambang. Meskipun jalan relatif bagus, namun kendaraan umum masih belum memadai yang berakibat mobilitas penduduk antardesa atau kecamatan menjadi terhambat, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian maupun perkebunan penduduk. Untuk kendaraan umum, jumlahnya yang relatif memadai ada di Kecamatan Sebatik Utara dengan jumlah kendaraan mencapai 152 unit, sementara untuk fasilitas transportasi laut, hanya ada dua dermaga perintis yang masih beroperasi, yaitu di Sebatik Barat. Kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan sarana transportasi yang memadai dan mudah dijangkau.

Selain masalah transportasi, sarana pendidikan juga masih terbatas, terutama untuk jenjang sekolah lanjutan pertama (SLTP), sekolah lanjutan atas (SLTA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Jumlah sekolah di seluruh Kecamatan Sebatik jenjang sekolah dasar (SD) mencapai sekitar 21 sekolah negeri dan delapan sekolah swasta, sedangkan SLTP berjumlah tujuh sekolah negeri dan empat sekolah swasta, SLTA berjumlah empat sekolah, baik negeri maupun swasta, serta satu sekolah SMK (BPS Kabupaten Nunukan, 2015a). Kondisi sekolah yang belum memadai menyebabkan banyak anak usia sekolah yang kesulitan mengenyam pendidikan, terlebih jika jarak sekolah yang jauh dari rumah warga dengan sarana transportasi yang terbatas. Dengan demikian, hanya beberapa anak saja yang dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan masyarakat Sebatik masih rendah, sebagian besar warga hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar atau sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

## **STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT SEBATIK**

Ketahanan sosial yang masih rentan di Sebatik dapat dilihat dari kondisi SDM dan infrastruktur yang belum memadai. Hal itu tidak lepas dari pengelolaan potensi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang belum dilakukan secara optimal dan kerap terjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kebijakan yang tidak mendukung satu sama lain, dalam arti kurangnya koordinasi antarlembaga dan institusi sehingga pengelolaan wilayah Sebatik masih belum optimal.

Sampai saat ini, wilayah Sebatik masih mengalami kesulitan dalam hal akses sarana dan prasarana, baik darat, laut maupun udara, yang dapat menghambat perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa Aji Kuning. Kesulitan dalam hal aksesibilitas menuju kabupaten atau daerah sekitarnya mengakibatkan masyarakat lebih memilih berinteraksi dengan masyarakat di wilayah Sabah, Sebatik Malaysia. Kecenderungan seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerentanan, baik secara sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang, terutama di tengah era globalisasi dan pasar bebas ASEAN (MEA). Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus dalam menangani persoalan di wilayah perbatasan Sebatik sehingga pengelolaan potensi yang ada dapat optimal. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik, di antaranya adalah melalui pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dan optimalisasi kerja sama lintas batas.

Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat diartikan sebagai upaya membangun suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi atau aset, seperti potensi alam, sosial, kelembagaan, teknologi maupun prasarana yang ada secara efektif, optimal, dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan produktif, seperti mendorong ekspor ekonomi masyarakat dan membangun Kawasan Berikat Tematik (KBT). Pengembangannya dapat dilakukan melalui pendekatan optimalisasi pemanfaatan potensi atau aset unggulan yang dimiliki serta pember-

dayaan masyarakat lokal. Prioritas pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil terluar yang tertera dalam program Nawacita Jokowi dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan wilayah perbatasan secara lebih optimal dan terintegrasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Pembangunan yang terintegrasi sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian wilayah Sebatik.

Selain melalui pemberdayaan pembangunan berbasis potensi wilayah melalui Zona Ekonomi Khusus maupun Zona Kawasan Bahari Terintegrasi, peningkatan ketahanan sosial dapat dilakukan melalui optimalisasi kerja sama lintas batas antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Secara sederhana kerja sama lintas batas dapat diartikan sebagai kerja sama internasional yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral antarnegara atau antar kawasan, baik yang berbatasan secara langsung maupun tidak, untuk mencapai keuntungan dan tujuan bersama (Gerfert, 2009).

Terdapat beberapa jenis kerja sama, di antaranya zona demiliterisasi dan netralisasi, kerja sama perdamaian, dan kerja sama ekonomi atau perdagangan (Lee & Forss, 2011). Dalam konteks wilayah perbatasan Sebatik, di antara kerja sama yang sudah disepakati adalah kerja sama perdagangan lintas batas antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tertuang dalam *Border Trade Agreement* (BTA) tahun 1970. Kerja sama ini

bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas tradisional kedua negara dan menyepakati kuota lintas batas sebesar enam ratus ringgit untuk setiap perahu yang hendak melintas dengan nilai barangnya dalam jangka waktu satu bulan.

Kerja sama lintas batas diharapkan dapat membantu peningkatan potensi ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan Sebatik, terutama dari aspek sosial kemasyarakatan dengan semakin kuatnya hubungan masyarakat kedua negara, selain itu, dalam aspek ekonomi, kerja sama lintas batas juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan dengan semakin maraknya aktivitas perdagangan lintas batas kedua negara.

## PENUTUP

Pulau Sebatik adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati, bahari maupun mineral. Namun, potensi kekayaan alam yang melimpah tampaknya belum dikelola secara optimal dan terintegrasi. Akibatnya, program pembangunan belum banyak tersentuh pada aspek yang sangat potensial sehingga menjadikan wilayah Sebatik Indonesia jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya. Minimnya sarana transportasi dan infrastruktur, seperti ketersediaan kendaraan umum, air bersih dan sarana pendidikan dan kesehatan menyebabkan perkembangan pembangunan serta mobilitas penduduk antarkecamatan atau kabupaten masih sangat terbatas, terutama jika dibandingkan dengan wilayah

**Tabel 1.** Potensi dan Kendala Wilayah Perbatasan Sebatik

No	Sektor	Potensi/Aset	Kendala
1.	Sumber Daya Alam	Lahan pertanian dan perkebunan yang luas, daerah penangkapan ikan serta sumber daya mineral.	Sarana dan prasarana (infrastruktur) masih belum memadai dan tingginya biaya eksplorasi.
2.	Sumber Daya Manusia	Jumlah penduduk yang merata, beragam etnis yang harmonis, dan interaksi sosial yang kuat.	Kualitas SDM yang rendah akibat fasilitas pendidikan belum memadai.
3.	Transportasi	Jalur pelayaran perintis, jalur strategis lintas batas, berdekatan dengan jalur laut kepulauan Indonesia.	Pelabuhan dan dermaga masih belum memadai serta belum banyak sarana kapal pendukung.
4.	Pariwisata	Terdapat pantai berpasir yang dapat dijadikan kawasan wisata bahari.	Sarana dan prasarana belum memadai dan objek wisata bahari belum dikembangkan.
5	Pemerintahan	Potensi lembaga kecamatan.	SDM dan sistem yang belum memadai

\*Diolah dari berbagai sumber

sekitar, yakni Nunukan, Tarakan maupun Tawau (Malaysia). Tambahan lagi, aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih sangat terbatas. Kondisi di atas jelas dapat berdampak pada semakin rendahnya kualitas SDM Sebatik yang dikhawatirkan akan sulit bersaing dengan negara lain di tengah era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Penyelesaian persoalan di perbatasan Sebatik membutuhkan langkah yang tepat sehingga potensi yang ada dapat dikelola secara optimal dan terintegrasi. Terdapat dua langkah yang dapat dijadikan solusi pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik, antara lain pemberdayaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan optimalisasi kerja sama lintas batas. Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik berupa sumber daya alam, sosial masyarakat, ekonomi, maupun kelembagaan. Sementara itu, optimalisasi kerjasama lintas batas merupakan salah satu aspek penting yang juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan sosial wilayah perbatasan Sebatik dan perekonomian masyarakat kedua negara dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas. Kedua langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan wilayah Sebatik sebagai sebuah wilayah di perbatasan yang terintegrasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku dan Jurnal

- Alami, A. N. (2013). *Strategi pembangunan wilayah perbatasan melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis gender*. Jakarta: P2P LIPI (Laporan penelitian).
- Bakar, M. A. (2006). *Menata pulau-pulau kecil perbatasan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015a). *Kecamatan Sebatik dalam angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015b). *Kabupaten Nunukan dalam angka 2015*. Diakses pada 5 Agustus 2016 dari [www.nunukankab.bps.go.id](http://www.nunukankab.bps.go.id).
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015c). *Kecamatan Sebatik Barat dalam angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.

- BPS Kabupaten Nunukan. (2015d). *Kecamatan Sebatik Tengah dalam angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015e). *Kecamatan Sebatik Timur dalam angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015f). *Kecamatan Sebatik Utara dalam angka 2015*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- Booth, A. (2001). Pembangunan: Keberhasilan dan kekurangan. Dalam D. K. Emmerson (Ed.). *Indonesia beyond Soeharto: Negara, ekonomi, masyarakat, transisi*. Jakarta: Gramedia.
- BPS Kabupaten Nunukan. (2015). *Potret usaha pertanian Kabupaten Nunukan menurut subsektor*. Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan.
- Murray, K. & Zautra, A. (2012). *Community resilience: Fostering recovery, sustainability, and growth*. New York: Springer Science and Business Media.
- Saleh, M. H. (2015) Dinamika masyarakat perbatasan eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif cultural studies. *Jurnal Borneo Administrator*, 11(1).
- Setiawan, B., Bandiyono, S., Sudiyono, dan Saekarni, M. (2012). *Kompleksitas pembangunan dan strategi pemberdayaan keluarga di perbatasan Sebatik*. Yogyakarta: Penerbit Elmatera.
- Siburian, R. (2012). Pulau Sebatik: Kawasan perbatasan Indonesia beraroma Malaysia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14(1).
- Tirtosudarmo, R. dan Haba, J. (2005). *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

### Dokumen

- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011.

### Internet

- Carlson, L., Bassett, G., Buehring, W., Collins, M., Folga, S., Haffenden, B., Petit, F., Phillips, J., Verner, D., & Whitfield, R. (2012). Resilience: Theory and application, Argonne: Argonne National Laboratory. Diakses dari [www.ipd.anl.gov/anlpubs/2012/02/72218.pdf](http://www.ipd.anl.gov/anlpubs/2012/02/72218.pdf).
- Gerfert, S. (2009). Cross-border cooperation: Transforming borders. Diakses pada 4 Maret

- 2015 dari [http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc\\_S\\_Getfert.pdf](http://essay.utwente.nl/60149/1/BSc_S_Getfert.pdf)
- Hidayanto, M. (2016). Potensi ketahanan pangan Pulau Sebatik sebagai pulau kecil wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Diakses pada 30 Agustus 2016 dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemandirian-pangan/BAB-IV/BAB-IV-5.pdf>
- Lee, S. & Forss, A. (2011). *Dispute resolution and cross-border cooperation in Northeast Asia: Reflections on the nordic experience (Asia Paper)*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy. Diakses pada 17 September 2016 dari [http://isdpeu/content/uploads/publications/2011\\_lee-forss\\_dispute-resolution-and-cross-border-cooperation.pdf](http://isdpeu/content/uploads/publications/2011_lee-forss_dispute-resolution-and-cross-border-cooperation.pdf)
- Mengintip Perbatasan Negeri di Pulau Sebatik. (2015). <http://www.ujungmimpi.com/2015/05/pulau-sebatik-mengintip-perbatasan.html>
- Sebatik. (2016). Diakses pada 10 Agustus 2016 dari [http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/297](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297)
- Puryanti, L. & Husain, S. B. (2011). A people-state negotiation in a borderland: A case of the Indonesia-Malaysia frontier in Sebatik Island. *Jurnal Wacana*, 13(1).
- Sakdapolrak, P. (2016). The concept of social resilience. Diakses pada 17 September 2016 dari [www.transre.org](http://www.transre.org)
- Suparman. (2016, 11 Juni). Wawancara oleh Fakhry Ghafur dengan warga Sebatik Tengah.

